SISTEM EKONOMI LAISSEZ FAIRE ADAM SMITH

Muthmainnah Sultan (90100118119)

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar

E-mail : *muthmainnahsultan7@gmail.com*

A. Pengertian dan Sejarah Munculnya Laissez Faire

Laissez-faire adalah sebuah frase bahasa Perancis yang berarti “biarkan terjadi”. Istilah ini berasal dari diksi Perancis yang digunakan pertama kali oleh para psiokrat di abad ke-18 sebagai bentuk perlawanan terhadap intervensi pemerintah dalam perdagangan. Pandangan “*Laissez faire*” ini baru kemudian mengendur, terutama sejak pemikiran Keynes yang membenarkan campur tangan pemerintah pada sektor ekonomi memperoleh konsensusnya, yaitu sejak depresi besar awal tahun 1930-an. (Rahmawaty, 2013)

Laissez-faire ini menekankan bahwa pemanfaatan terhadap sumber-sumber ekonomi yang terbatas akan mencapai tingkat efisiensi yang tinggi, dan pada gilirannya akan mendorong tercapainya pemerataan dan kesejahteraan bersama apabila pemerintah tidak campur tangan secara langsung dalam perekonomian. Dalam pandangan *laissez-faire*, kewajiban negara bukanlah melakukan intervensi untuk menstabilkan distribusi kekayaan atau untuk menjadikan sebuah negara makmur untuk melindungi rakyatnya dari kemiskinan, melainkan masalah ekonomi hendaknya sepenuhnya diserahkan pada mekanisme pasar. (Parakkasi & Kamiruddin, 2018)

Dalam pandangan *laissez-faire*, kewajiban negara bukanlah melakukan intervensi untuk menstabilkan distribusi kekayaan atau untuk menjadikan sebuah negara makmur untuk melindungi rakyatnya dari kemiskinan, melainkan bersandar pada sumbangan dan sistem pasar. *Laissez faire* juga menyatakan bahwa pemerintah tidak boleh memberi hak khusus dalam bisnis. Misalnya, penganut dari *laissez-faire* mendukung ide yang menyatakan bahwa pemerintah tidak boleh membuat monopoli legal atau menggunakan kekuasaan dan paksaan untuk merusak monopoli defacto. Pendukung dari *laissez-faire* juga mendukung ide perdagangan

bebas dalam artian negara tidak boleh melakukan proteksi, seperti tariff dan subsidi, di wilayah ekonominya.

B. Kritik Adam Smith terhadap Mercantisme

Kaum merkantilis berusaha melakukan perdagangan yang seimbang, artinya bahwa simpanan emas dan perak harus selalu tetap, tidak boleh berkurang, dengan cara “memperbesar ekspor dan mengurangi impor adalah dua alat utama yang dipakai sistem merkantilis untuk memperkaya negara”. Menurut Smith aturan yang tinggi, kewajiban, aturan kuota, dan aturan-aturan lainnya yang ditujukan untuk membatasi perdagangan, produksi, dan pada akhirnya membatasi standar hidup akan menimbulkan konflik dan perang antar bangsa. (Hafizah, 2016)

Smith merupakan seseorang yang begitu menentang pengenaan tarif tinggi dan pembatasan perdagangan. Usaha untuk menyeimbangkan perdagangan menurutnya adalah “*absurd*”. Menurut kebijakan merkantilis hanya menghasilkan kemakmuran dan keuntungan bagi produsen dan pemegang monopoli saja. Karena merkantilisme tidak menguntungkan konsumen, maka merkantilisme bersifat anti pertumbuhan dan dangkal karena menurutnya “dalam sistem merkantilis, kepentingan konsumen selalu dikorbankan demi kepentingan produsen.

Selanjutnya Smith juga mengatakan bahwa hambatan perdagangan akan mengurangi kemampuan kedua negara untuk memproduksi dan karenanya hambatan itu harus dihilangkan dengan memperluas perdagangan antar dua negara atau lebih, maka negara-negara tersebut akan mendapat keuntungan. Menurut lagi “Jika suatu negara lain dapat memberikan kita komoditas yang lebih murah ketimbang jika kita membuatnya sendiri, maka kita lebih baik membelinya dari negara tersebut. (Faruq & Mulyanto, 2017)

DAFTAR PUSTAKA

- Rahmawaty, A. (2013). Distribusi Dalam Ekonomi Islam Upaya Pemerataan Kesejahteraan Melalui Keadilan Distributif. *Equilibrium*, 1(1).
- Faruq, U. A., & Mulyanto, E. (2017). Sejarah Teori-Teori Ekonomi.
- Hafizah, Y. (2016). Kebijakan Ekonomi Indonesia Ditinjau dari Konsep Dasar Ekonomi Islam. *Millah: Jurnal Studi Agama*, 4(2), 31-46.
- Parakkasi, I., & Kamiruddin, K. (2018). Analisis Harga Dan Mekanisme Pasar Dalam Perspektif Islam. *Laa Maisyir: Jurnal Ekonomi Islam*, 5(1).